



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

KOMISI ETIK PENELITIAN

Jl. RS. Fatmawati Pondok Labu - Jakarta Selatan 12450

Telp/Fax. 7656971 Ext.123

Homepage: <https://kep.upnvj.ac.id> E-mail : kep@upnvj.ac.id

PERSETUJUAN ETIK ETHICAL APPROVAL

Nomor : 243/V/2024/KEP

Komite Etik Penelitian UPNVJ, dalam upaya melindungi hak asasi dan kesejahteraan subjek penelitian dan menjamin bahwa penelitian yang menggunakan formulir survey/registrasi/surveilans/Epidemiologi/Humaniora/Sosial Budaya/Bahan Biologi Tersimpan /Sel punca dan non klinis lainnya berjalan dengan memperhatikan implikasi etik, hukum, sosial dan non klinis lainnya yang berlaku, telah mengkaji dengan teliti proposal penelitian berjudul:

Kemunduran Demokrasi: Analisis Politik Kewargaan di Indonesia Studi Kasus Gerakan Perlawanan Kelompok Nelayan Tahun 2016-2020

Research Ethics Committee of UPNVJ, in order to protect the rights and welfare of the research subjects, and guaranty that the research using survey questionnaire/ registry/ surveillance/ epidemiology/ Humaniora/ Social According to ethical, legal, /Biological Materials Stored/stemcells and another non-clinical walk with attention to the social implications, has been thoroughly reviewed the proposal entitled :

Nama Peneliti Utama

: Syauiid Alamsyah

Principal Investigator

Pembimbing / Peneliti Lain

: Sri Lestari Wahyuningroem

Supervisor / Other Researcher

Nama Institusi

: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPNVJ

Institution

Protokol tersebut dapat disetujui pelaksanaannya.

Hereby declare that the protocol is approved.

Ditetapkan di : Jakarta

Issued in

Tanggal

:22 Mei 2024



Prof. Dr. Med. Frans Santosa, Sp.JP, FIHA, EPMA, FACA,

FICA, FASA, SFGISA

NIK: 217121299

Keterangan/Notes :

Persetujuan etik ini berlaku selama satu tahun sejak tanggal ditetapkan.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, peneliti wajib menyerahkan laporan kemajuan, laporan Kejadian Tidak Diinginkan Serius/KTDS (bila ada), dan laporan akhir pada saat selesai penelitian ke KEP UPNVJ.

Jika ada perubahan protokol/amanden dan/atau perpanjangan penelitian, harus mengajukan kembali permohonan kajian etik penelitian.

This Ethical clearance is effective for one year from the date specified.

In accordance to Indonesian national regulation, progress, Serious Adverse Events/SAE (if occurred) and final/summary report should be submitted to the EC of UPNVJ.

If there be any modification/amandments and/or extension of the study, the Principal Investigator is required to resubmit the protocol for approval.

Pedoman Penelitian

No.	Indikator	Pertanyaan Penelitian
1.	Dimensi “Citizenship as Membership”	Apakah kelompok nelayan Jakarta mendapatkan pengakuan sebagai warga Jakarta?
		Apakah kelompok nelayan Jakarta mendapatkan pengakuan sebagai kelompok profesi nelayan?
		Nelayan sebagai penduduk warga Jakarta, apakah mendapatkan hak-haknya sebagai warga?
		Bagaimana kelompok nelayan memperjuangkan hak-hak kewargaannya?
		Apakah kelompok nelayan Jakarta mendapatkan perlindungan sosial, ekonomi, dan politik dari pembangunan Reklamasi?
		Mengapa kelompok nelayan menolak pembangunan reklamasi?
		Permasalahan apa saja yang dihadapi dari ketidaksetaraan sebagai warga Jakarta dan kelompok nelayan?
		Mengapa pemerintah meminggirkan hak-hak kelompok nelayan atas pembangunan reklamasi?
2.	Dimensi “Citizenship as Legal Status”	Ketika melakukan perlawanan, apakah kelompok nelayan mendapatkan ancaman pencabutan KTP Jakarta?
		Kelompok nelayan memenangkan 2 kali gugatan atas pembangunan pulau F,I,K dan Pulau G, mengapa pemerintah memilih terus melanjutkan reklamasi? Dan meminggirkan ketetapan hukum yang diperjuangkan kelompok nelayan?
		Apakah ada tuntutan dari pemerintah atau korporasi dari gerakan perlawanan ini?
		Bagaimana kelompok nelayan menghadapi tuntutan balik dari pemerintah dan negara?
3.	Dimensi “Citizenship as Right”	Apakah negara memberikan hak-hak sosial, politik, ekonomi, dan budaya terhadap kelompok nelayan?
		Apakah negara membatasi hak-hak kelompok nelayan?

	Mengapa hak-hak kelompok nelayan dibatasi bahkan dipinggirkan oleh negara?
--	--

		Bagaimana negara memperlakukan kelompok nelayan atas tuntutan kepentingannya?
		Apakah terdapat kesetaraan hak yang diberikan negara terhadap kelompok nelayan?
		Apa dampak terburuk dari terampasnya hak-hak kelompok nelayan atas pembangunan reklamasi
		Hak apakah yang dituntut kelompok nelayan dari gerakan perlawanannya?
		Mengapa hak itu begitu penting bagi kelompok nelayan?
4.	Dimensi “Citizenship as Participation”	Bagaimana partisipasi warga terhadap pembangunan reklamasi?
		Apakah warga diikutsertakan dalam kebijakan reklamasi?
		Mengapa partisipasi warga dibatasi atas pembangunan reklamasi?
		Seperti apa negara membatasi partisipasi warga dalam pembangunan reklamasi?